

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

- TEMA** : **Membedah Sekolah Rakyat: Memicu Kesenjangan atau Kesetaraan?**
- Pemateri** :
1. Dyah Ayu Meliana Larasati – Research Fellow/Social Policy Expert, Resilience Development Initiative
 2. Made Natasya Restu Dewi Pratiwi – Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute
 3. Adita Irawati – Juru Bicara, Kantor Komunikasi Kepresidenan RI
- Moderator** : Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Diskusi publik TIF Seri 119 yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, membahas tema penting seputar kebijakan pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat. Acara ini disiarkan secara langsung melalui platform Threads dan menghadirkan tiga narasumber, yakni Dyah Ayu Meliana Larasati (Research Fellow/Social Policy Expert dari Resilience Development Initiative), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial di The Indonesian Institute), dan Adita Irawati (Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI).

Diskusi dimulai dengan paparan dari Made Natasya yang menjelaskan landasan dari kebijakan Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini dirancang sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Made menyebutkan bahwa program ini telah terintegrasi dengan berbagai kebijakan sosial yang ada, seperti koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem dan meningkatkan partisipasi pendidikan.

Made juga mengangkat sejumlah respons masyarakat terhadap kebijakan ini. Di satu sisi, banyak keluarga miskin yang menyambut baik keberadaan Sekolah Rakyat karena dianggap memberi harapan baru bagi anak-anak mereka untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih baik. Antusiasme ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata yang coba dijawab oleh program tersebut. Namun, di sisi lain, Made mencatat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang menolak atau meragukan program ini, utamanya karena kurangnya informasi yang jelas dan keraguan terhadap implementasi di lapangan. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah belum terakomodasinya kebutuhan pendidikan vokasi, yang dianggap lebih relevan untuk langsung masuk dunia kerja.

Permasalahan lain yang turut disoroti adalah tantangan struktural dalam dunia pendidikan itu sendiri. Made menyoroti masalah literasi yang masih rendah, serta ketidakstabilan arah kebijakan akibat pergantian Menteri Pendidikan yang terlalu sering. Hal ini berdampak pada konsistensi kebijakan dan membuat masyarakat sulit memahami arah pembangunan pendidikan nasional. Di samping itu, Made mengangkat isu kastanisasi pendidikan, di mana masyarakat mulai membandingkan antara Sekolah Garuda—yang dianggap sekolah unggulan—dengan Sekolah Rakyat. Perbandingan ini memunculkan stigma dan ketimpangan dalam persepsi terhadap kualitas pendidikan.

Isu sosial juga menjadi perhatian, terutama terkait sistem pendidikan berasrama yang diadopsi oleh beberapa Sekolah Rakyat. Menurut Made, ada kekhawatiran dari orang tua dan siswa terhadap kemungkinan terjadinya isolasi sosial bagi anak-anak yang diasramakan. Banyak dari mereka menolak sistem ini karena alasan yang rasional, seperti keterikatan emosional dengan keluarga atau kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan asrama.

Meski demikian, Made tetap menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki banyak manfaat strategis. Di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan partisipasi sekolah dari kalangan miskin, serta kemampuan kebijakan ini untuk lebih mengakomodasi kebutuhan pendidikan lokal. Keberhasilan program ini, lanjut Made, sangat bergantung pada sinergi lintas kementerian/lembaga, serta pembangunan infrastruktur dan kurikulum yang adaptif terhadap konteks lokal.

Namun, tantangan ke depan tidak sedikit. Beberapa tantangan yang disebutkan oleh Made antara lain potensi melemahnya modal sosial ketika siswa harus meninggalkan komunitas asal mereka untuk tinggal di asrama, permasalahan tata kelola yang belum sepenuhnya relevan dengan kondisi di daerah, ketidaktepatan sasaran penerima program, serta tumpang tindih dengan kebijakan pendidikan lain yang telah ada sebelumnya.

Melalui diskusi ini, publik diajak untuk melihat secara lebih jernih bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada komunikasi publik yang efektif, transparansi dalam pelaksanaan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat sipil, akan menjadi kunci keberlanjutan dan keberhasilan dari program ini.

Made memaparkan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan. Ia menekankan bahwa manfaat utama dari kebijakan ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, peningkatan partisipasi sekolah, serta kemampuan Sekolah Rakyat untuk mengakomodasi kebutuhan lokal secara lebih fleksibel. Dengan dukungan infrastruktur dan kurikulum yang dirancang melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga (K/L), diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan menyentuh sasaran yang tepat.

Namun demikian, Made juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang dihadapi Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah potensi terhambatnya modal sosial apabila siswa diasramakan, yang bisa memutus hubungan mereka dengan komunitas asal. Selain itu, tata kelola Sekolah Rakyat masih perlu disesuaikan dengan konteks lokal, terutama dalam hal relevansi program dan ketepatan sasaran yang belum sepenuhnya tercapai. Ia juga menyoroti adanya tumpang tindih antara Sekolah Rakyat dengan program pendidikan lain yang sudah ada, yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari upaya pembelajaran dari negara lain, Made mencontohkan program GEAR UP di Amerika Serikat, yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan finansial para pesertanya melalui pendekatan pendidikan yang terstruktur dan inklusif. Model keberhasilan ini, menurutnya, dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun dan menjalankan Sekolah Rakyat secara lebih baik.

Lebih lanjut, Made merekomendasikan agar komunikasi publik diperbaiki untuk menciptakan pemahaman dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Partisipasi publik juga perlu ditingkatkan, terutama dengan melibatkan keluarga dari calon peserta Sekolah Rakyat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya fasilitasi terhadap para lulusan, serta perlunya mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan dan menyeluruh guna memastikan keberlangsungan dan akuntabilitas program ini.

Sementara itu, pembicara kedua, Adita Irawati, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk implementasi dari amanat konstitusi, khususnya UUD 1945, yang mengharuskan negara hadir dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara. Ia menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 64% anak dari orang tua miskin berpotensi tetap hidup dalam kemiskinan saat dewasa, mencerminkan siklus yang terus berulang akibat keterbatasan akses pendidikan. Tingkat putus sekolah juga masih tinggi, terutama pada kelompok miskin ekstrem, di mana 74% dari mereka hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD atau lebih rendah.

Menanggapi realitas ini, Adita menyebutkan bahwa kehadiran negara sangat penting, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, untuk memutus mata rantai kemiskinan yang berulang. Ia menambahkan bahwa dalam merancang kebijakan Sekolah Rakyat, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, dan standar kualitas pendidikan. Sekolah Rakyat, menurut Adita, harus setara dengan sekolah formal lainnya dalam hal bahan ajar, kurikulum, dan kompetensi tenaga pengajar, agar tidak menciptakan stigma atau disparitas pendidikan yang baru.

Ia juga menekankan bahwa karakter cinta Tanah Air akan menjadi salah satu hasil pendidikan yang ingin dibentuk melalui Sekolah Rakyat. Program ini direncanakan mulai berjalan pada Juni–Juli mendatang, dengan pelibatan aktif dari pemerintah daerah dan pendampingan lintas kementerian/lembaga. Meski bersifat terobosan, Adita menyebut bahwa kebijakan ini tidak lepas dari kerangka teknokrasi yang terstruktur dan telah melalui berbagai proses perumusan lintas sektor.

Dalam pernyataan penutupnya, Adita menyampaikan bahwa visi Presiden adalah membangun SDM unggul demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, program ini menasar aspek paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Ia mengajak publik untuk bersama-sama mengawal implementasi program ini secara kritis dan konstruktif.

Dyah Ayu Meliana Larasati, pembicara selanjutnya, memaparkan data dan tantangan aktual dalam dunia pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) sudah menunjukkan perbaikan. Namun, di jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dan perguruan tinggi, capaian masih rendah, terutama di kalangan laki-laki, mereka yang tinggal di perdesaan, dan kelompok pengeluaran terbawah. Rendahnya partisipasi pendidikan ini berdampak langsung pada kualitas tenaga kerja dan produktivitas nasional.

Dyah juga menyebut bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk menjawab tantangan ini, seperti Kurikulum Merdeka, Program Indonesia Pintar, dan kebijakan pengurangan beban pengeluaran keluarga serta peningkatan pendapatan. Namun, banyak anak yang tetap memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan kompleks, mulai dari keterbatasan ekonomi, jarak, hingga persepsi keluarga terhadap pentingnya pendidikan.

Kebijakan Sekolah Rakyat yang tengah digagas menghadapi tantangan koordinasi yang sangat kompleks, mengingat keterlibatan sedikitnya 14 kementerian/lembaga (K/L) serta peran penting dari kepala daerah seperti bupati dan gubernur. Dalam tataran ideal, koordinasi lintas institusi ini semestinya berjalan mulus demi menjawab tantangan pendidikan yang dihadapi masyarakat, namun dalam praktiknya, koordinasi adalah hal yang jauh lebih sulit diwujudkan daripada sekadar diucapkan. Koordinasi harus benar-benar terjadi, bukan hanya menjadi jargon dalam dokumen kebijakan.

Salah satu poin penting yang disoroti oleh Dyah dari The Indonesian Institute adalah pentingnya pembangunan indikator yang komprehensif dan berbasis data untuk mendeteksi latar belakang anak-anak yang tidak

sekolah—apakah karena faktor ekonomi, keluarga, atau pengalaman traumatis seperti bullying. Situasi ini sangat kontekstual dan berbeda di tiap daerah, sehingga pendekatannya pun harus spesifik dan berbasis pada pemetaan yang dilakukan secara langsung melalui dialog dengan calon peserta didik dan keluarganya. Program Sekolah Rakyat harus mampu merespons kebutuhan nyata dan kompleks ini, bukan hanya hadir sebagai solusi normatif.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial yang lebih luas. Made menekankan pentingnya memasukkan kurikulum yang menyentuh isu kekerasan seksual dan kesehatan mental. Dalam masyarakat miskin, efek kebijakan pendidikan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang tak kasatmata. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkaran kemiskinan rentan mengalami trauma, dan sistem pendidikan harus peka terhadap hal ini, bukan malah menambah beban psikologis mereka.

Di sisi lain, masih banyak stigma yang salah kaprah tentang keluarga miskin. Anggapan bahwa orang tua tidak peduli terhadap pendidikan anak karena rendahnya tingkat pendidikan mereka harus diluruskan. Justru sebagian besar orang tua menyatakan bahwa bila mereka menerima bantuan langsung atau tunjangan pendidikan, dana itu akan mereka gunakan sepenuhnya untuk kebutuhan sekolah anak. Ini menunjukkan bahwa program afirmatif seperti Sekolah Rakyat harus dibangun di atas asumsi dan bukti yang benar, bukan prasangka.

Program ini juga tak bisa lepas dari pengawasan dan evaluasi. Dyah menutup dengan harapan agar kebijakan ini benar-benar berbasis bukti (*evidence-based*) dan dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi. Pemerintah harus membuka diri terhadap kritik dan saran, serta membenahi sistem pemantauan agar lebih objektif dan jujur. Made juga mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat harus mampu merespons kebutuhan lokal dan memberikan edukasi yang relevan, bukan hanya pengetahuan umum, tetapi juga hal-hal krusial seperti kekerasan seksual dan kesehatan mental.

Dengan semua tantangan ini, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, penyediaan grievance mechanism yang jelas, serta kepekaan terhadap aspek sosial dan emosional peserta didik adalah kunci. Bukan hanya untuk memastikan anak-anak bisa mengakses pendidikan, tetapi juga agar pendidikan yang diberikan benar-benar bermakna. Apakah koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan bisa terwujud? Hanya waktu dan komitmen yang akan menjawabnya.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.**

TERIMA KASIH ~